

**PENGARAHAN MENTERI PERHUBUNGAN PADA PEMBUKAAN
PEMBEKALAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2009
TANGGAL 10 FEBRUARI 2009**

Yang Saya hormati

Para Nara Sumber dari BPK, KPK, BPKP, Departemen Keuangan dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)

Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Perhubungan

Para Undangan dan peserta pembekalan

Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara pembekalan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Departemen Perhubungan tahun anggaran 2009.

Saudara-saudara para undangan dan peserta pembekalan yang saya hormati

Kita baru saja mengakhiri tahun anggaran 2008, sekaligus mengawali tahun anggaran 2009 yang merupakan akhir tahun dari tahapan siklus 5 tahunan pemerintahan kita. Oleh karenanya saya menganggap bahwa acara pembekalan Kuasa Pengguna Anggaran yang mengambil tema “ PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN” sangat penting.

Dari data perkembangan anggaran dan pelaksanaannya tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah terjadi peningkatan ketersediaan anggaran pertahun yang sangat signifikan. Tahun 2005 total anggaran yang tersedia Rp. 6,248 triliun, menjadi 15,402 triliun pada tahun 2008 atau kenaikan rata-rata 51,9 % per tahun. Dengan belanja modal rata-rata meningkat 35,49 % pertahun.

Realisasi anggaran juga meningkat dari tahun ketahun, yaitu tahun 2005 Rp.4,529 triliun, menjadi Rp.13,460 triliun pada tahun 2008 atau kenaikan rata-rata 43,77% per tahun. Dengan belanja modal meningkat rata-rata 46,85% pertahun.

Yang juga membanggakan bahwa realisasi anggaran meningkat tidak hanya karena ketersediaan anggaran yang meningkat, tetapi juga daya serap keuangan yang meningkat, yaitu pada tahun 2005 72%, dan pada tahun 2008 menjadi 87%, sedangkan anggaran belanja modal terserap 88%.

Peningkatan daya serap yang tinggi ini menunjukkan bahwa Saudara-saudara para pengelola anggaran sudah menunjukkan prestasi yang tinggi terhadap tugas pokok dan fungsinya melalui pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Dimana pada kondisi tekanan dan atau tuntutan untuk selalu bekerja sesuai peraturan, reformasi yang menuntut kinerja penyelenggara negara lebih baik (bahkan kadang2 berlebihan). Untuk itu saya sebagai pimpinan Departemen Perhubungan memberi apresiasi kepada Saudara para Kuasa Pengguna Anggaran dan dan seluruh jajaran pengelola anggaran.

Untuk dapat menjadi lebih baik dimasa datang, beberapa catatan terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2008 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan anggaran dan daya serapnya masih menumpuk di akhir tahun. Pada akhir semester anggaran baru dapat terserap sekitar 25%. Kurang dapat mendukung rencana pemerintah untuk mendorong atau memberi multiplier effect pada perekonomian masyarakat. Disamping juga menyulitkan Menteri Keuangan dalam pengelolaan uang kas.
2. Masih banyak sanggahan2 terhadap hasil pelelangan. Beberapa sanggahan dapat diabaikan secara material walaupun secara adminstrasi tetap harus dikelola dengan baik. Tetapi beberapa memerlukan perhatian, karena diduga mengandung kebenaran, sehingga harus dapat diatasi dan menjadi perhatian penyelesaiannya.
3. Masih terdapat temuan-temuan BPK, BPKP, dan atau Itjen terhadap pelaksanaan anggaran. Beberapa temuan adalah kejadian berulang yang seharusnya dapat dihindari.
4. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang masih perlu penanganan dan perbaikan serius. Seperti diketahui bahwa sistem keuangan negara mewajibkan pengguna anggaran untuk melaporkan pelaksanaan anggaran sesuai standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan.

Saudara-saudara undangan dan peserta pembekalan yang saya hormati,

Seperti telah saya singgung sebelumnya bahwa tahun anggaran 2009 tahun penting untuk berpijak kearah tahapan pembangunan negara kita selanjutnya. Pemerintah Pusat sangat menaruh perhatian dan sekaligus harapan kepada pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya adalah transportasi. Peningkatan kinerja dalam bentuk penambahan kapasitas, serta kualitas pelayanan jasa transportasi diyakini pemerintah akan dapat meningkatkan perekonomian dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan sistem penganggaran berbasis kinerja, program dan atau kegiatan, terutama yang sifatnya strategis dan prioritas harus dapat segera dilaksanakan dan dioperasikan dan harus dapat secara nyata meningkatkan kinerja Departemen Perhubungan. Tidak cukup hanya sampai pada proyek atau kegiatan pembangunan selesai.

Selain itu sebagai penerima anggaran 10 terbesar, juga diharapkan penggunaan/ pelaksanaan anggaran dapat diserap oleh masyarakat, baik dari keikut sertaannya melaksanakan proyek maupun dalam penyerapan tenaga kerjanya. Dan ini sesuai dengan kebijakan pembangunan adalah Pro Growth, Pro Job dan Pro Poor.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, DIPA Departemen Perhubungan tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut : dari mata anggaran Departemen Perhubungan sendiri (mata anggaran 022) sebesar 16,977 triliun, ditambah dari mata anggaran Menteri Keuangan (MA lain-lain 999) sebesar 2,335 triliun, sehingga total 19,312 triliun. Akan bertambah lagi dengan anggaran stimulus, yang diperkirakan berjumlah 1,325 triliun. Sehingga total anggaran pemerintah yang akan dilaksanakan dan harus dipertanggungjawabkan Departemen Perhubungan pada tahun anggara 2009 disekitar angka 20 triliun. Jumlah yang cukup besar.

Untuk itu keberhasilan yang telah kita capai dalam melaksanakan anggaran tahun 2008 agar dilanjutkan dan sekaligus mengatasi kekurangannya.

Saudara-saudara Kuasa Pengguna Anggaran yang saya banggakan.

Telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan tentang perbendaharaan negara bahwa Kementerian dan Lembaga yang memperoleh DIPA harus membuat pertanggungjawaban laporan keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Seperti diketahui Laporan Keuangan Departemen Perhubungan tahun 2006 dan 2007 memperoleh penilaian *disclaimer* dari BPK. Target Departemen

Perhubungan adalah perolehan penilaian Wajar Dengan Pengecualian terhadap Laporan Keuangan tahun 2008, dan Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan secara berkelanjutan mulai tahun 2009. Sistem akuntansi pemerintah mengharuskan laporan keuangan secara berjenjang, yaitu dari Unit Pelaksana Teknis/ Satuan Kerja Sementara kepada Unit Akuntansi Wilayah yang telah ditunjuk, kemudian kepada Unit Eselon I, dan selanjutnya Unit Akuntansi Pengguna Anggaran di Sekretariat Jenderal. Ketidak sesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada UPT/ Satker secara berjenjang juga akan berpengaruh pada Laporan Keuangan Departemen Perhubungan. Oleh karena itu diminta Saudara untuk dapat membuat Laporan Keuangan (termasuk BMN) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Manfaatkan acara pembekalan ini secara maksimal, dan kepada para penatar, panitia serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pembekalan ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Akhirnya dengan mengucapkan “ **Bismillahirrohmanirrohim** “ Pembekalan Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan Tahun 2009 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Sekian Terima Kasih

Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL